



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2025



STASIUN PSDKP BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan II Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu Triwulan II Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 14 Juli 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H

NIP. 19830730 200801 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Triwulan II tahun 2025. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 9 Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif;
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan;
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan;
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif;
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2025, terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi

komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai NKO 108,56. Selama Triwulan II Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan perhitungan atas capaian 10 indikator kinerja, dimana 21 indikator lainnya belum dilaksanakan perhitungan dan baru akan dihitung ketika semester 2 ataupun tahunan sebagaimana mekanisme penilaian terhadap indikator kinerja dimaksud. Berikut capaian atas 10 indikator kinerja:

1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 50 dan capaian sebesar 50;
2. Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
3. Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
4. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 70 dan capaian sebesar 81;
5. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 70 dan capaian sebesar 81;
6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan dengan target 82 dan capaian 95,72;
7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan dengan target 74 dan capaian 81,72;
8. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) target 100 dan capaian 100;
9. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan target 95% dan capaian sebesar 100%;
10. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 88,5 dan capaian 92,34.

Realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 37,46% atau sebesar Rp **10.213.233.133,-** (Sepuluh Milyar Dua Ratus Tiga Belas juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dari alokasi anggaran Rp **27.261.542.000,-** (Dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah). Melalui Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja guna mendorong pencapaian target pada triwulan berikutnya.

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif.....	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
BAB I PENDAHULUAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
a. IKU 9: Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks).....	39
b. IKU 9: Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks).....	42
a. IK 13: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.	44
b. IK 14: Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.	46
c. IK 15: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Resiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.	47
d. IK 16: Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan.	49
e. IK 18: Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.	50
BAB IV PENUTUP	52

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan Speedboat siap operasi.....	13
Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja.....	14
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025.....	19
Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2025.....	23
Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2025	24
Tabel 6. Hasil Pengukuran IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	26
Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Dengan Renstra Tahun 2020-2024	26
Tabel 8. Tahapan pemeriksaan IKU 4.....	28
Tabel 9. Capaian IKU 7	28
Tabel 10. Rekap pemeriksaan SDK Triwulan II	30
Tabel 11. Rekap Pengawasan PRL.....	31
Tabel 12. Pemeriksaan IKU 5.....	35
Tabel 13. Capaian IKU 5	35
Tabel 14. Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan.....	37
Tabel 15. Rekapitulasi Penerbitan SLO.....	37
Tabel 16. Rekap Pengawasan Pengolahan	38
Tabel 17. Rekap Pengawasan Importasi	38
Tabel 18. Capaian IKU 9	40
Tabel 19. Rekap pengenaan sanksi administratif	41
Tabel 20. Rekapitulasi SPKP	43
Tabel 21 Capaian IK 10.....	43
Tabel 22. Uraian indikator IKPA	45
Tabel 23. Capaian IKPA Stasiun PSDKP Belawan	45
Tabel 24. Capaian IK 13.....	45
Tabel 25. Capaian IK 14.....	47
Tabel 26. Capaian IK 16.....	48
Tabel 27. Capaian IK 17.....	49
Tabel 28. Capaian IK 12.....	50
Tabel 29. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Periode Tahun 2025.....	52

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	12
Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	13
Gambar 3. Sistematika Penyusunan Lkj Stasiun PSDKP Belawan	14
Gambar 4. NPSS Stasiun PSDKP Belawan.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan- kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawasan SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “good governance”.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap Tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap Tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu AkBelawan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu akBelawan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah Stasiun PSDKP Belawan;
- b. Adanya dugaan kegiatan transshipment di laut;
- c. Tidak terpantaunya kapal – kapal perikanan melalui radar VMS;
- d. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan.
- e. Masih terdapat kegiatan penangkapan yang merusak.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- b. Masih terdapatnya pelaku usaha yang belum memiliki CBIB dan CPIB.
- c. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Masih terdapatnya UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP.

4. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

- a. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin PKKPR.
- b. Penambangan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

a. Kepala Stasiun:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Umum:

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

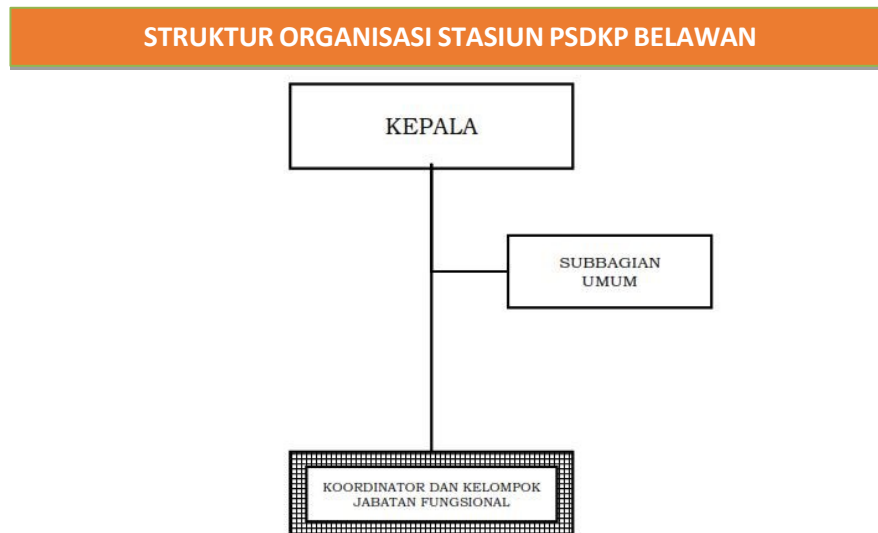
c. Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f. Satuan Pengawasan SDKP:

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-

masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 (tiga) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 9 (sembilan) Wilayah Kerja (Wilker) sebagaimana Struktur Organisasi pada Gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 Propinsi (Aceh, Sumatera Utara dan Riau) dan 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 571, meliputi perairan Selat Malaka. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Dalam pelaksanaan operasional pengawasan di wilayah kerja, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan membawahi 3 Satuan Pengawasan SDKP, yaitu:

- 1) Satuan Pengawasan SDKP Asahan
- 2) Satuan Pengawasan SDKP Langsa
- 3) Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir

4. Armada Pengawas dan Speedboat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan speedboat pengawas. Berikut data kapal pengawas dan speedboat pengawas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan Speedboat siap operasi

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Stasiun
1	Hiu 01	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
2	Hiu 08	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
3	Hiu 16	32 meter	Stasiun PSDKP Belawan
4	Napoleon 028	12 meter	Stasiun PSDKP Belawan
5	Dolphin 014	8 Meter	Satwas Asahan

Sumber: Bagian Operasi Armada Stasiun PSDKP Belawan

5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Tahun 2024 sebanyak 128 orang, yang terdiri dari PNS Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 69 orang, 25 orang PPPK, 9 orang PPNP dan PJLP sebanyak 25 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja

	PNS	PPPK	PPNP	PJLP	TK AKP	Jumlah
Belawan	28	8	5	18		59
Langsa	3			3		6
Idi	2			1		3
Lhokseumawe	1					1
Bireun	1					1
Sigli						0
Asahan	5	3	3	1		12
Batubara						0
Rokan Hilir	2		1	1		4
Panipahan				1		1
Dumai	2			1		3
Kep. Meranti	2					2
Tembilahan	2					2
Hiu 01	8	4				12
Hiu 08	7	5			1	13
Hiu 16	8	2			1	11
Luar Belawan		2				2
Jumlah	71	24	9	26	2	132

Sumber: Bagian Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha Stasiun PSDKP Belawan

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3. Sistematika Penyusunan Lkj Stasiun PSDKP Belawan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2025 - 2029; ⁽²⁾Manual Indikator Kinerja Tahun 2025; ⁽³⁾Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025; ⁽⁴⁾Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025 - 2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025 – 2029 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2025 - 2029. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP periode 2025 – 2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

"Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan"

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025 – 2029

Rencana Strategis (Renstra) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2025 - 2029 menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan yaitu memadu serasikan kebijakan pusat dan UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah pemokus kegiatan pengawasan kepada perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun visi dan misi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Sasaran : Indonesia bebas illegal fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

C. Program Kerja Pengawasan SDKP

1. Program

Program merupakan instrument kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2025 – 2029 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;

- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Stasiun PSDKP Belawan.

Selain kegiatan di atas Stasiun PSDKP Belawan juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 khususnya pada kebijakan "membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan". Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029, ditetapkan yaitu "Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan". Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 strategi implementatif yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (Integrated Surveillance System/ISS).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK. 1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	82
SK. 2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	02	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	75
		03	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	75
SK. 3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	04	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100
SK. 4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	05	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100
SK. 5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	06	Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	92
		07	Indeks operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	92
SK. 6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana	08	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT	100

	Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan		Stasiun PSDKP Belawan (%)	
SK. 7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	09	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	81
SK. 8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	94
SK. 9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	81,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	87
		15	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	88
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	88,5
		19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	80
		20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	1
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	70

E. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

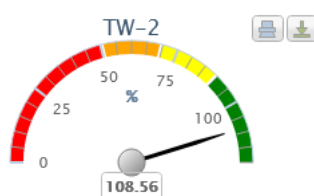
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Stasiun PSDKP Belawan sebesar 108,56% untuk Triwulan II, capaian dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. NPSS Stasiun PSDKP Belawan

Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan

Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Stasiun PSDKP Belawan dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 21 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 Tahunan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya pada Tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
					2025	Juni	Juni	
SK1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif						100	
1	100	100	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	50	50	100
SK2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif						0	
2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	0	0	0
3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	0	0	0
SK3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan						100	
4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSKDP Belawan	Indeks	Maximize	Rata-rata	100	100	100	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan						100	
5	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan lingkup UPT Stasiun PSKDP Belawan	Indeks	Maximize	Rata-rata	100	100	100	100
SK5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif						0	
6	Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	0	0	0
7	Indeks operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	0	0	0
SK6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						0	
8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0	0	0
SK7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan						115,71	
9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	70	81	115,71
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	70	81	115,71
SK8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan						0	
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	0	0	0
SK9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						103,20	
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,5	0	0	0
13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	82	95,72	116,73

14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87	74	81,72	110,43
15	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	0	0	0
16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95	95	100	105,26
18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,5	88,50	92,34	104,34
19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0	0	0
20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0	0	0
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	0	0	0

Pada Triwulan II tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan menetapkan 21 Indeks Kinerja dan dalam akBelawanisasinya 10 IK dilaksanakan dengan kriteria 6 IK dengan predikat baik, 4 IK dengan predikat istimewa. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang Triwulan II tahun 2025. Realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 37,46% atau sebesar Rp **10.213.233.133,-** (Sepuluh Milyar Dua Ratus Tiga Belas juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dari alokasi anggaran Rp **27.261.542.000,-** (Dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	12,642,051,000	2,006,183,811	15,87%
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	61,237,000	47,418,200	77,43%
3	Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	136,708,000	38,133,088	27,89%
5	Dukungan Manajemen	14,421,546,000	8,121,498,034	56,32%
Total		27.261.542.000	10,213,233,133	37,46%

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 10 indeks kinerja yang dapat dicapai oleh Stasiun PSDKP Belawan pencapaian terhadap evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas”**. Target Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar 80% dan ditetapkan sebagai target semesteran. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan. Indikator ini menjadi target semesteran yaitu 50 dan tahunan yaitu 80.

Pembinaan POKMASWAS bertujuan untuk pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Pada TW II Tahun 2024 capaian IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas tercapai sesuai target yaitu sebesar 50. Target ini tercapai karena Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki rencana kerja kegiatan pengawasan (bobot 20%) dan telah melakukan pendataan keaktifan Pokmakwas (bobot 30%). Untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, saat ini Stasiun PSDKP Belawan masih menunggu jadwal dari anggota komisi IV DPR RI., Capaian IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas pada TW II tahun 2024 sama dengan Capaian IKU pada TW II tahun 2023. Capaian IKU ke-1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas”, dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Pengukuran IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU1	2025 : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	80	50	50	100
IKU1	2024 : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	80	50	50	100

IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :

Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2020 - 2025					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
2025 : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	80	-	-	-	-	80	80	-

Pelaksanaan tugas dalam upaya pengawasan Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas dilakukan Oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan berkoordinasi dengan Sesditjen PSDKP hal Narasumber pada saat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pokmaswas. Pelaksanaan tugas pengawasan Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

2. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Sasaran Kegiatan ketiga menghasilkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu;

1. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.

Kondisi ini tidak berbeda dengan penetapan perjanjian kinerja pada tahun 2024. Penjabaran sasaran kegiatan pada 1 indikator kinerja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi Stasiun PSDKP Belawan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan pelaku usaha kelautan.

a. IKU 4: Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

IKU Indeks pemeriksaaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan IKU yang berbicara tentang tupoksi organisasi dalam pengawasan kelautan. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan oleh Polsus PWP3K. Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha kelautan berpedoman pada Peraturan yang berlaku sebagaimana jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. IKU ini terdiri atas beberapa jenis pengawasan kelautan diantaranya:

1. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
3. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya;
5. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Formula:

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

x_{sdk} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i

n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Tahapan pemeriksaan IKU 4

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : 1. Membuat jadwal pemeriksaan; 2. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; 3. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau 4. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usahan (tergantung sifat pengawasan), Daftar Pertanyaan (tergantung sifat pengawasan)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pada Triwulan II Tahun 2025 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 100, sebagaimana target triwulan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. Capaian IKU 7

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II 2025	2025	TW II 2025	s/d TW II 2024	TW II 2024
Indeks penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan instrumen pengawasan. Indikator kinerja ini memberikan batasan sehingga pengawasan yang merupakan tujuan utama dari organisasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak hanya merujuk kepada kaidah pengawaan akan tetapi tertib dalam pengadministrasian.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Stasiun PSDKP Belawan agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misanya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan sharing session dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih professional dan bertanggungjawab;
5. Segera melakukan pulbaket terkait laporan yang masuk, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat serta menambah target pengawasan insidentil yang dilaksanakan;
6. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Adapun kendala dalam melaksanakan IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) antara lain:

1. Wilayah pengawasan yang jauh;
2. Kurangnya informasi pendahuluan terkait objek yang diawasi;
3. Adanya perbedaan persepsi terkait peraturan yang berlaku;
4. Benturan tradisi dengan peraturan yang masih perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan maupun jalur keagamaan.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Berikut kami sajikan rekapitulasi data pengawasan SDK selama Triwulan II tahun 2025 lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Tabel 10. Rekap pemeriksaan SDK Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Realisasi TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2024
1	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	1
2	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	0
3	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	3	2
4	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	7
5	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	-	-
Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		5	10

Pengawasan dilaksanakan secara rutin maupun insidental dengan menggunakan longboat atau dengan kunjungan yang dapat diakses melalui perjalanan darat. Pengawasan perlu ditingkatkan dengan upaya komunikatif maupun dengan langkah sanksi administratif.

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 3 pelaku usaha pemanfaatan ruang laut. Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPRIL adalah perizinan dasar, selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut. pengawasan PKKPRIL erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan pengawasan perikanan lainnya sehingga kedudukan perizinan PKKPRIL sangat urgent diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya.

Tabel 11. Rekap Pengawasan PRL

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut PT. Intibenua Perkasatama	- dilakukan pengawasan ruang laut dan pemanfaatan ALSE di dua lokasi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh PT Intibenua Perkasatama (IBP), yaitu di Jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau (koordinat 1.749874oN – 101.371930oE). - A. PKKPRIL Nomor 19102310511400006 Tanggal 19 Oktober 2023, dengan luas 7,93 Ha, yang dimanfaatkan untuk dermaga dan ALSE; - B. izin lingkungan berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 612 Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024, Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Refinery dan Fraksinasi, Kernel Crushing Plant, Oleochemical dan Biodiesel, Speciality Fats, Solvent Extraction Plant, Tangki Timbun dan Gudang Serta Fasilitas Pendukung Lainnya Yang Dilengkapi Dengan Dermaga dan Kegiatan Pengerukan Perairan di Wilayah Dermaga Seluas 42 Ha di PT Intibenua Perkasatama; - C. Izin ALSE Nomor 81201088039120003 Tanggal 30 September 2024, berlaku hingga 30 September 2034, yang dipergunakan untuk proses desalinasi dan pendinginan turbin, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT IBP; - D. Izin Operasional Tersus PT IBP dari Ditjen

	Perhubungan Laut Nomor A.325/AL.308/DJPL Tanggal 5 April 2021. - PT IBP telah melaporkan Laporan tahun 2024 via website e-sea dan seluruh dermaga berada pada areal yang telah memiliki izin PKKPR. Untuk pemanfaatan ALSE, lokasi pompa intake air laut juga berada pada areal yang telah memiliki dokumen PKKPR, pemanfaatan ALSE hingga Mei 2025 adalah 6.117.103 M3 dari kuota sebesar 30.309.600 M3 per tahun dan telah membayar tagihan PNPB pemanfaatan ALSE Tahun 2025 sebesar Rp 7.557.400
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut PT. Intibenua Perkasatama	- lokasi kedua di Komplek Pelabuhan PELINDO, Jl. Datuk Laksamana, Kel. Buluh Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Riau (koordinat 1.688242oN – 101.448814oE); - A. PKKPR Nomor 04102420511400001 Tanggal 4 Oktober 2024, dengan luas 0,01 Ha, yang dimanfaatkan hanya untuk ALSE; - B. Izin Lingkungan berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8448/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2022, tanggal 28 Oktober 2022, Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Minyak Goreng, Tangki TImbun dan Gudang di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Buluh KAsap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau Oleh PT Intibenua Perkasatama; - C. Izin ALSE Nomor 81201088039120002 Tanggal 22 November 2024, berlaku hingga 22 November 2034, yang dipergunakan untuk proses desalinasi dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT IBP; - PT IBP pada lokasi kedua ini belum menyampaikan Laporan Tahunan karena masih memiliki waktu hingga 21 November 2025. Seluruh area PKKPR hanya dipergunakan untuk rumah pompa dan pompa intake air laut. Untuk pemanfaatan ALSE, lokasi pompa intake air laut juga berada pada areal yang telah memiliki dokumen PKKPR, pemanfaatan ALSE hingga Mei 2025 adalah 256.450 M3 dari kuota sebesar 1.277.500 M3 per tahun dan telah membayar tagihan PNPB pemanfaatan ALSE Tahun 2025 sebesar Rp 319.375.
PT. Agro Murni	- pengawasan ruang laut terhadap PT Agro Murni, yang beralamat di Jl. Ketam Putih, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kec.Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau (koordinat 1.800167oN – 101.357448oE);

	- Adapun data PT Agro Murni adalah : - A. NIB : 8120015272905 Tanggal 20 Desember 2018 - B. Bidang Usaha : Multi KBLI, utamanya Pengolahan Kelapa Sawit dan juga KBLI 36002 sebagai pendukung - C. Status : PMA - D. Izin Lingkungan : Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.3627/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha Atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit dan Pembangunan Terminal Khusus Serta Fasilitas Pendukung Lainnya di Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau Oleh PT Agro Murni; - E. Izin PKKPRL Nomor 28022310511400005 dengan Luas 39,87 Ha dengan aktivitas Pembangunan Dermaga dan SWRO, tanggal dokumen tidak dapat diidentifikasi (invalid da) - F. PBUMKU, Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus Nomor 812001527290500010002 Tanggal 2 November 2024 dari Menteri Invetasi/Kepala BKPM ;
--	--

3. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan menurunkan 1 IKU yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu "Indeks Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah berjalan sejak tahun 2024. IKU ini merupakan penjabaran atas tugas pengawasan dan satu-satunya indikator kinerja pada bidang pengawasan sumber daya perikanan.

a. **IKU 5: Indeks penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan**

IKU indeks Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan IKU lama yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja Stasiun PSDKP Belawan dalam tugas pengawasan sumber daya perikanan. Indeks kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

- x_{sdp} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
 Xi : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i
 n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Tabel 12. Pemeriksaan IKU 5

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis resiko), Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSPD	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pelaksanaan pengawasan terhadap IKU ini terbagi atas 4 (empat) kegiatan pengawasan diantaranya:

1. Kualitas penyelesaian pemeriksaaan kapal penangkap ikan;
2. Kualitas penyelesaian pemeriksaaan unit pengolahan ikan;
3. Kualitas penyelesaian pemeriksaaan distribusi ikan;
4. Kualitas penyelesaian pemeriksaaan budidaya perikanan.

IKU ini dapat dicapai Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai yang sangat memuaskan yaitu dengan nilai 100 dan persentasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengawasan yang mendukung IKU ini pengawas perikanan berpedoman kepada Perdirjen 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Perdirjen tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan secara teknis, dan terdapat berbagai peraturan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan yang erat hubungannya dengan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Berikut tabel capaian indikator kinerja 6.

Tabel 13. Capaian IKU 5

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2025	TW II 2025	s/d TW II	TW II 2024
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan diantaranya;

1. Melengkapi Pengawas Perikanan dengan sarana dan pengawasan yang memadai dalam menjalankan tugas sehingga tugas menjadi optimal, semisal penggunaan vernier caliper, alat transportasi, kamera bawah air, dll;
2. Membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar, hal ini dimaksudkan pengawas perikanan harus memiliki kemampuan verbal yang baik sehingga penyampaian pesan dan maksud serta tujuan pengawasan dapat dipahami dengan baik, serta meminimalisir konflik mengingat kegiatan pengawasan berpotensi mewajibkan pengawasan perikanan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai latar belakang;
3. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan informasi dan persiapan telah ditetapkan pada saat kegiatan perencanaan;
4. Mengumpulkan informasi pendahuluan yang bersumber dari kegiatan pengawasan sebelumnya ataupun dari informasi yang telah dikumpulkan pengawas perikanan dari masyarakat atau dari dinas terkait tentang unit yang akan diawasi;
5. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, seperti internalisasi regulasi maupun kebijakan terbaru yang telah ditetapkan;
6. Melakukan sharing session dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan sehingga tidak ada benturan ketika pengawasan dilaksanakan;
7. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat diantaranya:

1. Masih terdapat kendala dalam pelayanan secara online;
2. Masih banyak stakeholder yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi online dalam pelayanan.

Analisa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU ini diantaranya;

1. Pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi terkait regulasi terkini, serta isu terkait pengawasan sumber daya perikanan;
2. Melakukan perencanaan dan revisi atas perubahan kegiatan atau adanya penambahan yang sifatnya urgent.

Sepanjang Triwulan II tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 perusahaan.

Tabel 14. Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan

NO	BULAN	PENANGKAPAN	BUDIDAYA	PENGOLAHAN	PEMASARAN	Total
1	April	0	0	1	0	1
2	Mei	1	0	0	2	3
3	Juni	0	0	1	0	1
	Total	1	0	2	1	5
	Target					100

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan

Pada TW II Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan belum ada melaksanakan Pengawasan terhadap pelaku usaha kapal perikanan namun Stasiun PSDKP Belawan melakukan pelayanan terhadap penerbitan SLO. Selama kurun waktu Triwulan II Stasiun PSDKP Belawan telah menerbitkan 301 SLO dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15. Rekapitulasi Penerbitan SLO

No	UPT/Satwas/Wilker PSDKP	TARGET TAHUN 2025	PIT	NON PIT	PIT			NON PIT		
					TAAT	TIDAK TAAT	TOTAL	TAAT	TIDAK TAAT	TOTAL
1	Stasiun PSDKP Belawan				198		198			-
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)						-	14		14
3	Kabupaten Bengkalis (P. RUPAT)						-	8		8
4	Kabupaten Kepulauan Meranti						-	4		4
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)						-	66		66
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai						-	5		5
7	Satwas PSDKP Langsa						-	23		23
8	Kabupaten Aceh Timur (IDI)				8		8	203		203
9	Kota Lhokseumawe (PUSONG)						-	65	1	66
10	Kabupaten Bireuen (Peudada)						-	21		21
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)						-	22		22
12	Kabupaten Pidie						-	36		36
13	Kabupaten Pidie Jaya						-			-
14	Satwas PSDKP Asahan				90	5	95	385	-	385
15	Kabupaten Batu Bara				-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	0	0	0	296	5	301	852	1	853

a.2 Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan

Pengawasan terhadap UPI dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2025 kepada 2 Pengusaha dengan metode pengawasan rutin maupun insidentil. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 16. Rekap Pengawasan Pengolahan

No	Nama Perusahaan / Perorangan	Kode Proyek / KBLI	Jenis Pengawasan	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)	Rekomendasi
1	PT GOLDEN SEAFOOD INDONESIA	202206-2615-3041-2545-072	OSS	Dokumen perizinan PT. Golden Seafood Indonesia lengkap dan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
2	PT AQUA FARM NUSANTARA	202102-2613-3653-6946-535	OSS	Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan bahwa PT. Aquafarm Nusantara telah memenuhi persyaratan yang ada pada SKP dan menerapkan HACCP pada bidang usaha yang dilakukan.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi hasil perikanan

Pengawasan terhadap kegiatan distribusi hasil perikanan dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2025 kepada 2 Pengusaha dengan metode pengawasan rutin maupun insidentil. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 17. Rekap Pengawasan Importasi

No	Nama Perusahaan / Perorangan	Kode Proyek / KBLI	Jenis Pengawasan	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)	Rekomendasi
1	PT ARTHA MAJU GEMILANG	-	Insidentil	Penggunaan form sudah sesuai, tetapi terdapat kurang pengisian diantaranya : Nomor Angka Pengenal Impor. adanya ketidaksesuaian Nama Penanggung Jawab yang ttd (Indra wibowo) berbeda dengan nama Penanggung Jawab dalam isian awal (Indra Gunawan) dimana ke2 Nama tsb tidak ada informasi dalam OSS sehingga terindikasi ada kesalahan penulisan, Tanggal penerbitan Rekomendasi Impor salah, seharusnya 23 Desember 2024. pengawas perikanan tidak menginput rencana dan realisasi distribusi	

				dalam Form Pengawasan (Point 7), point 7(a) Tidak ada input hasil pemeriksaan di tujuan. Tempat dan Tanggal Pengawasan kosong, sesuai SPT harusnya tanggal 20 Mei 2025. Dengan pertimbangan tersebut maka kurang kuat sebagai dasar pengenaan sanksi lanjutan	
2	ZAHID IMRAN INTERNATIONAL	202411-2109-5902-8497-964	Oss	Pembinaan dan Perbaikan	Pembinaan dan Perbaikan

3. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

- Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
- Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks).

a. **IKU 9: Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)**

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Stasiun PSDKP Belawan untuk;

1. pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
2. pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x* : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
- a* : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- b* : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai indeks 81 atas IKU ini berdasarkan perhitungan di atas. Total Stasiun PSDKP Belawan menyelesaikan 97 kasus pengenaan administrasi yang terdiri dari 4 Kasus pelabuhan Stasiun, 8 kasus DPI, 54 kasus menangkap di bawah 12 mil, 1 kasus zona konservasi, i kasus poaching , 26 kasus bidang kelautan dan 3 kasus bidang perikanan. Berikut kami sajikan tabel capaian dan tabel rekapannya.

Tabel 18. Capaian IKU 9

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2025	TW II 2025	s/d TW II	TW II 2024
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	70	81	81	81	80

Tabel 19. Rekap pengenaaan sanksi administratif

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)								ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT							Capaian Pengenaaan Sanksi Administratif KP SPKP
		TRANSSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALA N	DPI	JALUR (<12 NM)	ZONA KONSERVASI	POACHING	SIPIEXPIRED	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SUPERVISI / EKSPOSE	SP1	SP2	DENDA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (17+18)/(10-11-12-13-14)
1	Belawan	0	4	8	54	1	1	0	68	20	48	35	0	1	12	12	0	0	100%
	Total	0	4	8	54	1	1	0	68	20	48	35	0	1	12	12	0	0	

Kolom B. Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan Non SPKP

No	UPT	Sanksi Adm SDK					Sanksi Adm SDP				Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP Non SPKP
		SP1	SP2	SP3	Paksaan Pemerintah	Denda	SP1	SP2	Paksaan Pemerintah	Denda	
1	BELAWAN	24	1	1						3	100%
	Total	24	1	1	0	0	0	0	0	3	100%

Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar professional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Melaksanakan pengawasan dan penginformasian secara merata sehingga pendekatan persuasif telah dibangun sebagai dasar penetapan sanksi administrasi dikemudian hari apabila ditemukan pelanggaran;
4. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;

Kegiatan pengenaan sanksi administratif selama Triwulan II tahun 2025 telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 15,628,000,- atau sekitar 74,29% dari total pagu Rp. 21,037,000,-.

b. IKU 9: Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisi pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Formula :

$$X_{TLH} = \frac{\sum (X_1 + X_2 + X_n)}{n} \times 100\%$$

X_{TLH} Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan SDKP;

X_{1+2+n} Jumlah pelanggaran yang dilakukan tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (SP1, SP2, dan denda administratif) dan bukan pelanggaran

n Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

dengan kriteria indeks

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik

Hingga triwulan II tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pemeriksaan terhadap

39 dugaan pelanggaran SPKP menurut data pemantauan yang dilakukan oleh tim pusdal. Data dugaan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda maupun pemilik. Berikut hasil tindak lanjut tersebut kami sampaikan dalam bentuk tabel.

Tabel 20. Rekapitulasi SPKP

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)							ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT					CAPAIAN IKU PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF	
		TRANSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	ZONA KONSERVASI	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	%	Kriteria indeks (melihat tabel)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)
1	Belawan	0	2	5	31	1	39	10	29	17	0	0	12	0	0	100%	81
Total		0	2	5	31	1	39	10	29	17	0	0	12	0	0		

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas maka Stasiun PSDKP Belawan memperoleh capaian triwulan II sebesar 81 dari target triwulan II yang ditetapkan sebesar 70. Berikut kami sampaikan data capaian indikator kinerja dimaksud dalam bentuk tabel.

Tabel 21 Capaian IK 10

Indikator Kinerja				Target		Realisasi		
				TW II	2025	TW II 2025	s/d TW II	TW II 2024
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan				70	81	81	81	80

Analisis penyebab keberhasilan disebabkan antara lain:

1. Stasiun PSDKP Belawan menindaklanjuti dengan melaksanakan BAP kepada pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu;
2. Stasiun PSDKP Belawan memanfaatkan aplikasi online dalam hal ini zoom meeting agar mempermudah proses permintaan keterangan terhadap pemilik yang berdomisili di luar wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan.

Analisa kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja dimaksud adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan tindak lanjut kapal yang diindikasi melakukan pelanggaran. Stasiun PSDKP Belawan secara kontinu (mingguan) terus melakukan pemanggilan klarifikasi maupun berkoordinasi kepada UPT PSDKP lainnya agar proses permintaan keterangan dapat berjalan dengan lancar.

5. Sasaran kinerja 9: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kinerja ini menurunkan 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025. 10 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian. 10 indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Stasiun PSDKP Belawan (nilai);
2. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai);
3. Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Belawan (indeks);
4. Penilaian mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Belawan (nilai);
5. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Stasiun PSDKP Belawan (%);
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%);
7. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai);
8. Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Belawan (nilai);
9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Belawan (inovasi);
10. Nilai implementasi program budaya kerja (nilai).

Selama kurun waktu triwulan II Stasiun PSDKP Belawan melakukan penilaian terhadap 5 indikator kinerja manajerial yang dinilai secara triwulan yaitu pada point 2, 3, 5, 6, dan 7 sedangkan realisasi seluruh kegiatan dukungan manajemen selama triwulan II sebesar Rp 8,121,498,034 ,- atau sekitar 56,32% dari total pagu Rp 14,421,546,000,-

a. IK 13: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.

IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA dapat diformulasikan sebagai berikut

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.

- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Perhitungan terhadap capaian IKPA dapat langsung dilihat pada aplikasi berbasis web yaitu <https://spanint.kemenkeu.go.id/> dengan memilih menu MONEV PA.

Tabel 22. Uraian indikator IKPA

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja KontrakBelawan	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Tabel 23. Capaian IKPA Stasiun PSDKP Belawan

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	79.11	96.97	100.00	100.00	94.55	100.00	95.72	100%	0.00	95.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.87	19.39	10.00	10.00	9.46	25.00				
					Nilai Aspek	89.56		97.88				100.00				

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Tabel 24. Capaian IK 13

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2025	TW II 2025	s/d TW II 2024	TW II 2024
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	72	92	95,72	95,72	86,53

Pengukuran capaian IKPA dilaksanakan pada triwulan II dan tahunan. Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh capaian maksimal dari target yang ditetapkan. Tabel capaian IKPA Stasiun PSDKP Belawan telah menyajikan hasil capaian dengan menjabarkan seluruh indikator. Terdapat 2 indikator dengan nilai tidak maksimal walaupun masih dalam kategori baik yaitu deviasi halaman III DIPA dan pengelolaan UP/TUP.

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Revisi DIPA dilaksanakan dengan mematuhi kaidah maupun ketentuan yang ditetapkan Kementerian keuangan melalui DJA;
2. Pencatatan capaian output yang dilaksanakan rutin secara berkala yang merupakan korelasi antara capaian kinerja dan anggaran;
3. Kegiatan kontrak Belawan pada Stasiun PSDKP Belawan telah dilaksanakan dengan baik;
4. Pendistribusian atas pencatatan keuangan telah dilaksanakan di setiap level sehingga penyelesaian tagihan dilaksanakan dengan terukur.

Terdapat beberapa alasan sehingga terdapat 2 indikator yang konversi bobotnya tidak maksimal antara lain;

1. Pengelolaan UP/TUP yang belum optimal dikarenakan terdapat keterlambatan dalam revolving GUP ataupun PTUP sehingga mengakibatkan konversi bobot di bawah 100%;
2. Deviasi halaman III DIPA, realisasi tidak bergerak sejalan dengan rencana penarikan dana (RPD) dikarenakan terdapat efisiensi pada sebagian besar mata anggaran Stasiun PSDKP Belawan dan terdapat anggaran yang bersumber dari PNBPN yang belum dapat digunakan sehingga mengakibatkan disparitas yang lebih dari 5% dari setiap jenis belanja pada setiap kegiatan.

Analisa kegiatan yang menunjang antara lain:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan keuangan baik realisasi maupun seluruh indikator dalam penilaian IKPA;
2. SDM keuangan yang telah memadai dan tersertifikasi dengan BNT maupun sertifikat keahlian yang lain maupun internalisasi terhadap semua aspek yang berhubungan dengan pembelanjaan anggaran negara.

b. IK 14: Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai 81,72 dari target 77 pada triwulan II tahun 2025 sebagaimana surat Sesditjen PSDKP No. B.2324/DJPSDKP.1/KP.720/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 (lampiran II). Manfaat dari dilaksanakannya penilaian IP ASN adalah untuk menilai **kualitas**,

kompetensi, integritas, dan kinerja ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berikut capaian kami sajikan dalam tabel

Tabel 25. Capaian IK 14

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2025	TW II 2025	s/d TW II	TW II 2024
Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	77	81	81,72	81,72	83,09

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Keterlibatan pimpinan dalam monitoring capaian IP ASN, dengan melakukan pemantauan capaian per pegawai melalui WAG;
2. Distribusi informasi terkait kegiatan diklat yang dapat diikuti ASN baik secara luring maupun daring;
3. Kesadaran ASN dalam melakukan upgrade terhadap kemampuan dalam melaksanakan tugas.

Analisa kegiatan yang menunjang Adalah pelaksanaan kegiatan bimtek maupun diklat yang dilaksanakan baik secara internal KKP maupun oleh lembaga eksternal.

c. IK 15: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Resiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang

dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko

Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko

Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengendalian risiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Stasiun PSDKP Belawan **sebesar 100 dari target 100 pada triwulan II tahun 2025** dengan merealisasikan 11 pengendalian risiko dari 11 rencana, dengan perhitungan sebagai berikut

$$X = \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian ini dikarenakan seluruh kemungkinan risiko pada setiap tim kerja pada Stasiun PSDKP Belawan telah diidentifikasi, didokumentasikan serta telah diverifikasi dan dinilai sebagaimana surat Sesditjen PSDKP No. B.2332/PSDKP.1/OT.710/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 (lampiran III). Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 26. Capaian IK 16

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2025	TW II 2025	s/d TW II	TW II 2024
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala risiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam triwulan berjalan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;
2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut;
3. Menyusun risiko dan pencegahan dalam sebuah matriks yang telah disahkan oleh setiap tim kerja.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap

rencana dan pencegahan kedepan atas dasar eveluasi kegiatan sebelumnya.

d. IK 16: Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan.

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal. Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) sebanyak **75%** dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\text{Jml Rekomendasi} = (\Sigma N_t) / (\Sigma N) \times 100\%$$

Keterangan:

ΣN_t = Rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2

ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2

Tabel 27. Capaian IK 17

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II 2025	2025	TW II 2025	s/d TW II 2024	TW II 2024
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	95%	100%	100%	100%

Selama triwulan II tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah menyelesaikan 22 tindak lanjut atas 22 rekomendasi yang disampaikan itjen sebagaimana tertuang dalam surat Sesditjen PSDKP Nomor B.2306/DJPSDKP.1/TU.140/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 (lampiran IV), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Rekomendasi} = \frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$$

Analisa penyebab keberhasilan yang mendukung capaian ini adalah mendelegasikan pihak yang bertanggung jawab jika terdapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti, serta pimpinan yang proaktif untuk memantau sejauh mana progress tindak lanjut sudah diselesaikan.

Analisa kegiatan yang menunjang adalah kegiatan monitoring internal setelah rekomendasi disampaikan, yang dipimpin langsung oleh kasubag umum agar tindak lanjut dapat segera disampaikan.

e. **IK 18: Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.**

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan;

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).

Formula:

Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

$$x_{ikm} = x_1$$

x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP

x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai 92,34 dari target 88,5. **Pencapaian IKU ini dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna jasa di seluruh unit kerja yang ada di Stasiun PSDKP Belawan serta memberikan pelayanan publik yang profesional kepada pengguna jasa.** Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel 28. Capaian IK 12

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2025	TW II 2025	s/d TW II 2024	TW II 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	88,5	88,5	92,34	92,34	80

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan akBelawanisasi dalam melaksanakan pelayanan.

4. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2025 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2025 tanggal 02 Desember 2024, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 27,261,542,000,-. Sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki realisasi sebesar Rp. 10,213,233,133 atau 37,46% berdasarkan data OMSPAN.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama Triwulan II Tahun 2025, kinerja Stasiun PSDKP Belawan telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pada Tahun 2025, terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Tahun Triwulan II tahun 2025 dengan nilai NKO sebesar 108,56. Selama kurun waktu Triwulan II UPT Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan penilaian terhadap 10 Indikator Kinerja. 4 IK biru (istimewa) 6 IK lainnya berstatus hijau (baik).

B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian – bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan III Tahun 2025. Saran dan Rencana untuk memperbaiki capaian IKU pada Tahun 2025 terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 29. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Periode Tahun 2025

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Melaksanakan percepatan tindak lanjut hasil Analisa SPKP	• Menugaskan seluruh personal pada satwas maupun wilker dalam kegiatan permintaan keterangan	• Triwulan III
2	Melaksanakan evaluasi rutin terhadap capaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan	• Melakukan rapat evaluasi	• Triwulan III

